

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2022/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWAN AGUSTIAWAN FUAD
2. Jabatan : ASISTEN KASN
3. NHK : 870914

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.700.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m2/15 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/300 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 142.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV JEEF L.C HDTP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA D1BO2N12L2 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOBIL, DATSUN GO+ Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 200.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 453.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 4.495.000.000**III. HUTANG** Rp. 1.015.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.480.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.